



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<http://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

## Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai)

Sasmita Atika Sari Harahap<sup>1</sup>, Taufeni Taufik<sup>2</sup> dan Nurazlina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Riau, Program Studi Akuntansi email: sasmitamita01@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Riau, Program Studi Akuntansi email: taufentaufik949@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Riau, Program Studi Akuntansi, email: nurazlina75@gmail.com

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia. Populasi penelitian ini adalah pegawai diseluruh dinas dan badan organisasi perangkat daerah Kota Dumai yang berjumlah 34 OPD. Total sampel penelitian ini adalah 99 responden dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling yang menempati posisi kepala dinas, kepala bagian keuangan dan bendahara pengeluaran. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda yang diolah dengan bantuan program SPSS versi 23. Hasil menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sementara itu, pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Pengaruh variabel independen untuk menggambarkan variabel dependen adalah 43,4% sedangkan sisanya 56,6% dipengaruhi oleh variabel lain.*

**Kata kunci:** *Tingkat Penyerapan Anggaran, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.*

### Abstract

*This study aims to prove the factors that influence budget absorption level. The factors tested in this study were budget planning, budget implementation, administration record, and human resource competence. The population of this study are all employees in offices and organizations of our regional apparatus in dumai, totaling 34 OPD. The total sample of this research is 99 respondents with a sampling technique that is purposive sampling which occupies the position of head of department, head of finance and treasurer expenditure. Data analysis was performed using multiple linear regression methods with SPSS version 23. The results showed that budget planning, budget implementation, and human resources competence have an effect on level of absorption of budget. Next Administration Record don't have an effect on level of absorption of budget. The effect of independent variables to describe the dependent variable was 43.4% while the remaining 56.6% was influenced by other variables.*

**Keywords:** *Budget Absorption Level, Budget Planning, Budget Implementation, Administrative Recording, and Human Resource Competence*

---

## 1. Pendahuluan

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah atau yang lebih dikenal dengan UU otonomi daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah menciptakan perubahan mendasar terhadap pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, serta menjadi langkah awal kemunculan otonomi daerah. Setelah berlakunya kedua undang-undang tersebut, maka salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan kebijakan desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017[1] menyebutkan bahwa Penyerapan Anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Salah satu kota yang memiliki tingkat penyerapan APBD tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Kota Dumai. Pada bulan Juli 2016 penyerapan APBD Dumai baru mencapai 30% dari anggaran yang ditetapkan, padahal tahun anggaran akan segera berakhir, namun pada bulan Desember penyerapan anggaran langsung mencapai 93% berarti terjadi penumpukan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di akhir tahun. Lalu, untuk APBD Kota Dumai tahun 2017 serapannya pada bulan September ternyata baru mencapai 60% dari total APBD tahun itu Rp 1,14 triliun. (pekanbaru.tribunnews.com). Pada tahun 2018 Kota Dumai memperoleh jumlah anggaran yang telah disahkan oleh DPRD adalah sebesar Rp 1,065 triliun (goriau.com). Bulan Desember 2018 serapan APBD dumai hanya mencapai 90% (Globalriau.com). Padahal menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258/-PMK/2018[2] tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penegasan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga menetapkan bahwa sasaran penyerapan suatu anggaran dikatakan baik apabila mampu menyerap minimal 95% dari anggaran yang telah ditetapkan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali hal apa yang mempengaruhi organisasi perangkat daerah tersebut tidak memenuhi tingkat penyerapan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran adalah Perencanaan Anggaran. Menurut Halim [3] penyerapan anggaran yang baik harus diawali dengan perencanaan anggaran yang baik. Pelaksanaan Anggaran juga dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Pelaksanaan merupakan aktivitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Pencatatan Administrasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Kementerian keuangan mengungkapkan lambatnya proses pencairan anggaran untuk pembayaran proyek kepada kontraktor sering kali disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah. Selanjutnya untuk setiap organisasi sektor swasta maupun sektor publik diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas. Kompetensi SDM merupakan faktor penting dalam ketepatan penarikan dana instansi pemerintah.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *principal* dengan *agent*, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan keagenan pada sektor publik dapat dilihat pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyusun anggarannya sendiri, tetapi nantinya akan ada proses pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran yang telah

disusun tersebut. Untuk itu pemerintah daerah harus melaksanakan anggaran dengan hati-hati agar tercapai masyarakat yang sejahtera.

### **2.1.2 Penyerapan Anggaran**

Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 214/PMK.02/2017[1] yaitu evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Penyerapan anggaran menurut Kuncoro[11] tingkat penyerapan anggaran yaitu “suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi”.

### **2.1.3 Perencanaan Anggaran**

Menurut Zarinah[4] perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu.

### **2.1.4 Pelaksanaan Anggaran**

Menurut Harriyanto[5] dalam pelaksanaan anggaran, lambatnya penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja.
2. Proses pengadaan barang/jasa.
3. Mekanisme pembayaran (pencairan anggaran).

### **2.1.5 Pencatatan Administrasi**

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014[6] Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan pengertian Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintah. Ada beberapa komponen dalam menentukan pencatatan administrasi yaitu: dokumen penyusunan anggaran, proses penyusunan dokumen anggaran, pagu anggaran, dan pemahaman peraturan dalam Sembiring[7].

### **2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi menurut Permendagri No. 2 Tahun 2013[8] pasal 1 adalah “kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

## **2.2 Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran**

Perencanaan merupakan unsur penting yang harus ada didalam organisasi, jika didalam organisasi perencanaan sudah dilaksanakan dengan matang maka pelaksanaan program dan kegiatan kedepannya akan terlaksana dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

### **2.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2004[9], tahun anggaran pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah adalah tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dapat dikatakan bahwa, jika pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka

penyerapan anggaran nya juga semakin baik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

#### 2.2.3 Pengaruh Pencatatan Administrasi terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

Pencatatan Administrasi merupakan suatu proses kegiatan pendokumentasian mengenai pelaksanaan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, apabila dalam salah satu dokumen terdapat kesalahan pencatatan maka akan berdampak pada proses pencairan anggaran. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap penyerapan anggaran nantinya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pencatatan Administrasi berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

#### 2.2.4 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

Menurut Mardiasmo [10] menyatakan penyerapan anggaran berpengaruh cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap instansi harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Berarti untuk mencapai penyerapan anggaran yang baik maka sumber daya manusia harus dikelola dengan baik pula. Kalaupun menggunakan peralatan yang canggih dan handal namun tanpa dibarengi peran aktif sumber daya manusia yang memadai, peralatan tersebut tidak akan bekerja secara maksimal dalam Zarinah[4]. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Kompetensi SDM berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

### 3. Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai diseluruh dinas dan badan organisasi perangkat daerah Kota Dumai yang berjumlah 34 OPD. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang menggunakan kuisioner. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

#### 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

##### 3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Penyerapan Anggaran. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert antara skor 1 sampai 5. Skor 1 memiliki arti bahwa jawaban responden menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran, sedangkan skor 5 memiliki arti jawaban responden menunjukkan penyerapan anggaran yang tinggi.

##### 3.1.2 Variabel Independen

###### 1. Perencanaan Anggaran (X<sub>1</sub>)

Perencanaan anggaran diukur dengan menggunakan 6 indikator yang telah digunakan dalam penelitian Syarah, Fitri (2016) yaitu 1) komprehensif, 2) terperinci, 3) disiplin, 4) fleksibel, 5) prioritas, 6) keterbukaan.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert skor 1 sampai 5 dengan 9 pertanyaan dalam kuisioner. Kuisioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Syarah, Fitri (2016).

###### 2. Pelaksanaan Anggaran (X<sub>2</sub>)

Pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan 3 indikator yang telah digunakan dalam penelitian Harriyanto (2012) yaitu 1) persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satker, 2) pengadaan barang dan jasa, 3) mekanisme pembayaran.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert skor 1 sampai 5 dengan 3 pertanyaan dalam kuisioner. Kuisioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Harriyanto (2012).

### 3. Pencatatan Administrasi ( $X_3$ )

Pencatatan administrasi diukur dengan menggunakan 4 indikator yang telah digunakan dalam penelitian Sembiring (2017) [7] yaitu 1) dokumen penyusunan anggaran, 2) proses penyusunan dokumen anggaran, 3) pagu anggaran, 4) pemahaman peraturan.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert skor 1 sampai 5 dengan 4 pertanyaan dalam kuisisioner. Kuisisioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Nugraha (2018) [12].

### 4. Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_4$ )

Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan menggunakan 3 indikator yang telah digunakan dalam penelitian Moeheriono (2014) dalam Nugraha 2018 [12] yaitu 1) pengetahuan, 2) keterampilan, 3) sikap.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert skor 1 sampai 5 dengan 12 pertanyaan dalam kuisisioner. Kuisisioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Syarah, Fitri (2016) [13].

#### 3.1.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh tiap variabel independen dan dependen adalah analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS versi 23.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Tingkat Penyerapan Anggaran	99	10	15	11.77	1.323
Perencanaan Anggaran	99	31	45	39.45	3.072
Pelaksanaan Anggaran	99	9	15	11.96	1.702
Pencatatan Administrasi	99	12	19	15.63	2.003
Kompetensi Sumber Daya Manusia	99	31	58	46.42	5.539
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Data Olahan, 2019

### 4.2 Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas data dan uji reliabilitas data.

#### 4.2.1 Hasil Uji Validitas Data

Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka alat ukur yang digunakan dinyatakan valid dan sebaliknya, jika  $r$  hitung  $\leq$   $r$  tabel maka alat ukur yang digunakan tidak valid. Nilai  $r$  tabel dapat diperoleh dengan persamaan :

$$N - 2 = 99 - 2 = 97 = 0,197.$$

## 1. Tingkat Penyerapan Anggaran

Hasil uji validitas data variabel tingkat penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Data  
Variabel Tingkat Penyerapan Anggaran**

<b>Pernyataan</b>	<b>r Hitung</b>	<b>r Tabel</b>	<b>Kesimpulan</b>
PA.01	0.519	0.197	Valid
PA.02	0.255	0.197	Valid
PA.03	0.515	0.197	Valid

*Sumber: Data Olahan (2019)*

## 2. Perencanaan Anggaran

Hasil uji validitas data variabel perencanaan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Data  
Variabel Perencanaan Anggaran**

<b>Pernyataan</b>	<b>r Hitung</b>	<b>r Tabel</b>	<b>Kesimpulan</b>
PA.01	0.287	0.197	Valid
PA.02	0.262	0.197	Valid
PA.03	0.555	0.197	Valid
PA.04	0.399	0.197	Valid
PA.05	0.589	0.197	Valid
PA.06	0.307	0.197	Valid
PA.07	0.579	0.197	Valid
PA.08	0.486	0.197	Valid
PA.09	0.585	0.197	Valid

*Sumber: Data Olahan (2019)*

## 3. Pelaksanaan Anggaran

Hasil uji validitas data variabel pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Data  
Variabel Pelaksanaan Anggaran**

<b>Pernyataan</b>	<b>r Hitung</b>	<b>r Tabel</b>	<b>Kesimpulan</b>
PA.01	0.513	0.197	Valid
PA.02	0.691	0.197	Valid
PA.03	0.636	0.197	Valid

*Sumber: Data Olahan (2019)*

## 4. Pencatatan Administrasi

Hasil uji validitas data variabel pencatatan administrasi dapat dilihat pada tabel

5.

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Data  
Variabel Pencatatan Administrasi**

<b>Pernyataan</b>	<b>r Hitung</b>	<b>r Tabel</b>	<b>Kesimpulan</b>
PA.01	0.344	0.197	Valid
PA.02	0.458	0.197	Valid
PA.03	0.521	0.197	Valid
PA.04	0.479	0.197	Valid

*Sumber : Data Olahan (2019)*

## 5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Hasil uji validitas data variabel kompetensi SDM dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6. Hasil Uji Validitas Data  
Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
KSDM.01	0.552	0.197	Valid
KSDM.02	0.670	0.197	Valid
KSDM.03	0.457	0.197	Valid
KSDM.04	0.373	0.197	Valid
KSDM.05	0.616	0.197	Valid
KSDM.06	0.526	0.197	Valid
KSDM.07	0.610	0.197	Valid
KSDM.08	0.478	0.197	Valid
KSDM.09	0.496	0.197	Valid
KSDM.10	0.461	0.197	Valid
KSDM.11	0.616	0.197	Valid
KSDM.12	0.610	0.197	Valid

Sumber: Data Olahan (2019)

#### 4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Data

Jika nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ ) > 0.60 dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian adalah reliabel begitu juga sebaliknya. Berdasarkan data yang diperoleh, hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7. Hasil Uji Reabilitas Data**

No	Instrument Variabel Penelitian	Nilai Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
1	Perencanaan Anggaran ( $X_1$ )	0.763	0.60	Reliabel
2	Pelaksanaan Anggaran ( $X_2$ )	0.775	0.60	Reliabel
3	Pencatatan Administrasi ( $X_3$ )	0.668	0.60	Reliabel
4	Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_4$ )	0.862	0.60	Reliabel
5	Penyerapan Anggaran ( $Y$ )	0.611	0.60	Reliabel

Sumber: Data Olahan (2019)

#### 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.3.1 Hasil Uji Normalitas

**Tabel 8. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99611978
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.064
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber : Data Olahan (2019)

Jadi dapat dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $0.200 > 0.05$ .

#### 4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
Perencanaan Anggaran ( $X_1$ )	.981	1.020	Tidak terdapat Multikolinieritas
Pelaksanaan Anggaran ( $X_2$ )	.800	1.251	Tidak terdapat Multikolinieritas
Pencatatan Administrasi ( $X_3$ )	.365	2.741	Tidak terdapat Multikolinieritas
Penyerapan Anggaran (Y)	.379	2.638	Tidak terdapat Multikolinieritas

Sumber: Data Olahan (2019)

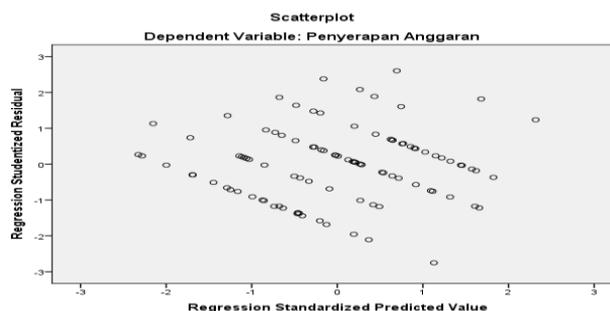
#### 4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Watson	N	Keterangan
1,992	99	Tidak terdapat Autokorelasi

Sumber : Data Olahan (2019)

#### 4.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak yaitu titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y. Jadi, dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

#### 4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel 11. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.459	1.609		-.907	.367		
X1	.191	.034	.444	5.660*	.000*	.981	1.020
X2	.143	.068	.184	2.124*	.036*	.800	1.251
X3	-.010	.085	-.015	-.113**	.910**	.365	2.741
X4	.089	.030	.371	2.945*	.004*	.379	2.638

- a. Dependent Variable: Tingkat Penyerapan Anggaran  
 Keterangan: Sig. <0.05 Diterima, Sig. > 0.05 Tidak Diterima  
 T < 1.97260 Tidak Diterima, T > 1.97260 Diterima  
 \*Diterima \*\* Tidak Diterima  
 Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan data pada tabel 11, maka hasil regresi linear berganda diperoleh Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = -1,459-0,191X_1+0,143X_2-0,010X_3+0,089X_4+e$$

#### 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)  
 Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.658 <sup>a</sup>	<b>0.434</b>	0.409	1.017	1.992

Dapat dinilai bahwa sebanyak 43,4% variabel tingkat penyerapan anggaran dijelaskan oleh variabel independen (perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia), sedangkan sisanya sebesar 56,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

#### 4.6 Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda pada tabel 11 dapat dirincikan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1: Diterima, karena nilai t hitung > t tabel yaitu 5.660 > 1.97260  
 H2: Diterima, karena nilai t hitung > t tabel yaitu 2.124 > 1.97260  
 H3: Ditolak, karena nilai t hitung < t tabel yaitu -0.113 < 1.97260  
 H4: Diterima, karena nilai t hitung > t tabel yaitu 2.945 > 1.97260

### 5. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Variabel pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- [2] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penegasan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga.
- [3] Halim, Abdul, "Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah", Salemba Empat, 2014.

- [4] Zarinah, Monik, Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Master Thesis, Akuntansi., Universitas Syiah Kuala., Aceh, 2016.
- [5] Harriyanto, Hendris, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian di Wilayah Jakarta, Master Thesis, Perencanaan Kebijakan Publik., Universitas Indonesia., Jakarta, 2012.
- [6] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- [7] Sembiring, Julian Henry, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Master Thesis, Akuntansi., Universitas Sumatra Utara Medan., 2017.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- [9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- [10] Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik”, Andi, 2009.
- [11] Kuncoro, Egiastyo Dwi, “Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Sipp pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil.1 Dinas PU Prov”, Kaltim.E-Journal Adminstrasi Bisnis, 364-373, 2013.
- [12] Nugraha, Rillo Yudha, “Pengaruh Perencanaan, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran pada OPD Provinsi Riau”, Jurnal Online Mahasiswa, 8, 2018.
- [13] Syarah, Fitri, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Wilayah KPPN I di Kota Bandung, Master Thesis, Akuntansi., Universitas Pendidikan Indonesia., 2016.